

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur bagi pengguna untuk menilai suatu perusahaan karena laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Informasi laporan keuangan merupakan unsur penting bagi investor, kreditor dan pelaku bisnis lainnya. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut relevan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna

dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang. Keputusan kontrak yang berdasar kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan. Dari perspektif investasi kualitas laporan keuangan yang rendah akan menyebabkan tidak efektifnya alokasi sumber daya. Kualitas laporan keuangan yang rendah menyebabkan *ineffisiensi* karena mengurangi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan alokasi modal yang tidak tepat. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014).

Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ronan Murphy (dalam Payanta, 2006:83) bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan

informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Kualitas laporan keuangan terbaik dapat dilihat dari pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di mana hal itu terungkap saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempresentasikan hasil pemeriksaan (audit) 2014 terhadap beberapa BUMN di Kantor Arsip BPK. Pemeriksaan tersebut atas enam laporan keuangan (LK) Badan Lainnya tahun 2014. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan LK Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penyelenggara Ibadah Haji (PIH), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel di bawah.

Table 1.1

Opini Laporan Keuangan Lainnya 2010-2014

No.	Entitas	Opini				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bank Indonesia	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
2	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	WTP DPP
3	Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	WTP DPP	WTP DPP
4	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	-	WDP	WDP	WDP	WDP
6	SKK Migas (BP Migas)	-	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari enam laporan keuangan, BPK memberikan satu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada SKK Migas (BP

Migas), tiga opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpana, dan Otoritas Jasa Keuangan, kemudian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Penyelenggara Ibadah Haji, serta Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Dari keenam BUMN tersebut tiga diantaranya yaitu Penyelenggara Ibadah Haji (PIH), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) walaupun telah mendapatkan opini WTP DPP tapi masih perlu menindaklanjuti rekomendasi dan catatan- catatan hasil pemeriksaan BPK, agar kualitas laporan keuangannya bisa lebih baik lagi selanjutnya. Begitupun dengan ke tiga BUMN lainnya yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kualitas laporan keuangan yang kurang baik sehingga harus ditingkatkan lagi kualitas laporan keuangan BUMN tersebut. (IHPS:2015)

Selain itu kasus lain pada tahun 2015 di BUMN, di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya temuan-temuan bermasalah dari empat belas perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tiga puluh lima perusahaan yang diusulkan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal ini sangat disayangkan kualitas laporan keuangan pada BUMN masih banyak yang bermasalah, atau disebut memiliki rapor merah dan belum menyelesaikan temuan dan laporan yang signifikan.

Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi memaparkan 14 perusahaan tersebut adalah PT Aneka Tambang (PT Antam), PT Angkasa Pura II, Perusahaan umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), PT Garam, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni), PT Perindustrian Angkatan Darat (PT Pindad), PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Sang Hyang Seri, Perusahaan umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas), Perum Perikanan, PT Industri Kapal, dan PT Pelabuhan Indonesia IV (PT Pelindo IV), PT Perikanan Nusantara.

Dalam dokumen tersebut, PT Antam belum menyelesaikan 12 rekomendasi dengan nilai temuan sebesar Rp 65,10 miliar, PT Angkasa Pura II belum menyelesaikan dua rekomendasi dengan nilai temuan Rp 50,97 miliar, PT Pelni belum menindaklanjuti 9 rekomendasi dengan nilai temuan sebesar Rp 501 miliar, PT Garam belum menyelesaikan 4 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 11,73 miliar, PT Pindad belum menyelesaikan 3 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 11,15 miliar.

Perusahaan lainnya adalah PT Pelindo IV yang belum menyelesaikan 2 rekomendasi dengan nilai temuan yang belum disebutkan, PT KAI belum menyelesaikan 12 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 18,7 miliar, Perum Perumnas belum menyelesaikan 5 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 732,69 miliar, PT Perikanan Nusantara belum menyelesaikan 2 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 106,89 juta.

PT Sang Hyang Seri belum selesaikan 1 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 662 juta, Perum Perikanan Indonesia belum selesaikan 14 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 5,58 miliar. PTPN IX belum selesaikan 3 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 52,37 miliar, PTPN X belum selesaikan 4 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 22,68 miliar, Perum Bulog belum selesaikan 3 rekomendasi dengan nilai temuan Rp 1,68 triliun. (Sumbarsatu.com)

(Temuan BPK: 14 BUMN yang Menerima Penyertaan Modal Negara Berkinerja Jelek Sumbarsatu.com , Rabu, 04 Februari 2015 14:24 wib)

Adapun kasus lain pada pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap empat BUMN, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perjan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Perum Perusahaan Film Nasional (PFN), dan PT Sarana Karya. BPK memberikan pendapat "Tidak Wajar" (TW) terhadap Laporan Keuangan PT Sarana Karya, "Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan" terhadap Perum PFN. Kemudian, "Wajar Tanpa Pengecualian" terhadap PT PLN, dan "Tidak Memberikan Pendapat" terhadap Perjan RSCM.

Hal ini dikarenakan kualitas laporan keuangan Perjan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta masih sangat rendah, karena sistem akuntansinya sangat tidak bagus dan harus diperbaiki. (Majalah Ekonomi, 02 Juni 2007).

Fenomena lain yang berkaitan dengan keterlambatan penyerahan laporan keuangan yang terjadi pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dikutip dari market.bisnis.com, Analisis PT Investa Saran Mandiri Kiswoyo, Adi Joe mengaku heran mengapa hingga kini PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) belum juga menyampaikan laporan keuangannya. Di luar kebiasaan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk belum juga merilis laporan keuangan auditan per 31 Desember 2012 yang seharusnya telah disampaikan paling telat 1 April 2013. Menurut Adi Joe, jika emitmen seperti PT Telkom Tbk wajar kalau telat karena mereka dual-listing. Sehingga, laporan keuangan harus disiapkan dua versi. Bursa efek Indonesia (BEI) telah menjatuhkan peringatan tertulis I kepada 52 emitmen yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2012. Bursa menyatakan batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2012 adalah apada 1 April 2013. Namun berdasarkan catatan bursa hingga 1 April 2013, terdapat 52 emitmen yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2013 ditemukan 21 objek pemeriksaan terkait BUMN. Hasil telaah BAKN terhadap hasil pemeriksaan BPK terkait BUMN itu ditemukan 510 kasus penyimpangan keuangan negara. Sebanyak 234 kasus diantaranya terkait kelemahan SPI dan sebanyak 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total 510 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kasus kasus yang mengakibatkan kerugian, ungkap Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso. Jumlah potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan di BUMN itu mencapai Rp

2,60 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sering menemukan kecurangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga membuat laporan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba yang sebenarnya. Menurut Wakil Ketua BPK Hasan Basri, mereka masih banyak menemukan BUMN melakukan rekayasa akuntansi, agar labanya terlihat lebih besar sehingga mendapatkan *reward* atau bonus. Soal mereka bayar pajaknya akan lebih besar itu tidak masalah.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak laporan keuangan yang tidak berkualitas, dan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu efektivitas pengendalian intern. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bodnar dan William S., (1995:215) yang menyatakan bahwa meskipun auditor internal dan pihak lainnya memperhatikan struktur pengendalian intern organisasi, tanggungjawab utama terhadap struktur pengendalian intern tetaplah pada manajemen.

Tanggung jawab tersebut di atas dapat diwujudkan dengan meningkatkan kemampuan manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Semakin mampu manajemen mengoperasionalkan fungsi-fungsinya, maka semakin efektif pengendalian intern dan semakin berkualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan/organisasi.

Akibat yang ditimbulkan oleh tidak efektifnya pengendalian intern, membutuhkan peran pimpinan instansi pemerintah dan auditor internal untuk

menjaga efektifitas pengendalian intern sebagai ikhtiar dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan mencegah tindak KKN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 PP No. 60 Tahun 2008 diamanahkan agar pimpinan instansi pemerintah menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

Efektifitas pengendalian intern dalam organisasi akan menghasilkan atau menjamin pelaksanaan pembukuan secara obyektif, benar dan dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang dikemukakan oleh COSO dalam May. Robert L (1993:60) yaitu meliputi tiga (3) bidang objektif : objektifitas operasi, objektifitas laporan keuangan dan objektifitas hukum dan regulasi.

Berdasarkan beberapa konseptual dan kajian empiris di atas, maka untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap pemerintah akan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang tercermin pada kualitas informasi laporan keuangan diperlukan penguatan dari berbagai pihak dan aspek, seperti pihak manajemen, auditor internal dan pengendalian intern. Untuk itu, dapat dirumuskan tema sentral yaitu pengaruh kemampuan manajemen dan kualitas jasa auditor internal terhadap efektivitas pengendalian intern dan implikasinya terhadap kualitas informasi laporan keuangan belum jelas, namun terdapat kecenderungan awal (berdasar konseptual dan kajian empiris di atas) bahwa dengan dukungan kemampuan manajemen yang andal dan jasa auditor internal yang berkualitas pada BUMN dan badan lainnya akan mempunyai

pengaruh pada efektivitas pengendalian intern dan implikasinya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan daerah.

Pernyataan di atas didukung penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Ari Udiyanti, dkk (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lain yang menguji hubungan pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan dilakukan oleh Gafarov (2009), Ferdy van Beest, et, al., (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Oleh karena itu, manajemen dan auditor internal perlu mengawasi, mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas pengendalian intern secara terus menerus agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bisa terhindar dari penyelewengan, resiko salah prosedur dan inefisiensi sehingga mampu menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.
3. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana pengendalian internal pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.
3. Untuk memahami dan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan didapat dari penelitian ini tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi lingkungan sekitar, seperti dilihat dari sudut pandangnya berguna untuk yang bersifat praktis dan teoritis serta selebihnya akan di uraikan kegunaan untuk siapa sajakah penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/ Akademis

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan wawasan tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami kualitas laporan keuangan

3. Bagi Masyarakat

a. Memberikan kontribusi terutama pada literatur-literatur sistem informasi akuntansi tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.

b. Sebagai bahan bacaan yang kiranya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan berfikir dan sebagai pengetahuan dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang sistem informasi akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris

Kegunaan dari dilakukannya penelitian di Perusahaan, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.
2. Bagi Instansi
 - a. Memberikan kontribusi terhadap praktisi dan masukan bagi PT Pos Indonesia dan PT KAI dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
 - b. Dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang perlu diambil tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Pos Indonesia dan PT KAI.
3. Bagi Masyarakat atau Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian dibidang sistem informasi akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yaitu Kantor Pusat PT Pos Indonesia yang beralamat di Jl.Cilaki No.73 Bandung 40115A. Telp. +6222161, Website: www.posindonesia.co.id, Dan PT KAI yang beralamat di jalan di jl.Perintis Kemerdekaan No 1 Bandung Telp. (022)4230031, Website: www.keretaapi.co.id. . Penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.